PERAN AMNESTI INTERNASIONAL DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR PADA TAHUN 2000-2015

Dzikiara Pesona Sadewa

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung 40132 Indonesia
E-mail *: Dzikiara_kiki@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Intention of this research are to know and understand how far role of Amnesty International For Struggle Towards Rohingya Etnic In 2000-2015. For answer the problems, Researchers analyzing the objectives, activities, programs of Amnesty International for the Human Rights Struggle Towards Rohingya Etnic In Myanmar 2000- 2015

The method used in this research is qualitative method. In collect datas, researcher was doing field studies, literature studies, online searchs and used purposive techniques for determine informans and then Researchers conducted interviews . As for the technique of analyzing the data, researchers used data reduction.

Results of the research shown that Amnesty Internasional Have big role for the Human Rights Struggle Towards Rohingya Etnic In Myanmar because Amnesty Internasional give impact for Rohingya. Amnesty International made the reports on human rights violations committed by the government and the ethnic majority that the report has shared in the world. And then various responses other countries that the government of Myanmar to stop these human rights violations, it is this which Amnesty International considered is very important to fight for human rights not only towards Rohingya ethnic but also in the world.

Key word : Amnesty International, Myanmar, Rohingya, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya upaya Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisis tujuan-tujuan,aktivitas-aktivitas, program kerja, kendala serta upaya yang dilakukan Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data-data peneliti melakukan studi pustaka serta penelusuran *online* dan menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan narasumber dan wawancara. Sedangkan untuk teknik menganalisis data, peneliti menggunakan reduksi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Amnesti Internasional memiliki peranan yang cukup besar karena pada dasarnya Amnesti Internasional memberikan pengaruhnya yang cukup besar terhadap etnis Rohingya. Amnesti Internasional membuat laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun etnis mayoritas yang laporan tersebut dipersebarluaskan. Oleh karena itulah muncul berbagai respon negara negara lain agar pemerintah Myanmar menghentikan pelanggaran HAM tersebut, hal inilah yang dianggap Amnesti Internasional ini memliki pengaruhnya yang sangat penting untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia tidak hanya terhadap etnis Rohingya tetapi juga di dunia

Kata Kunci : Amnesti Internasional, Myanmar, Rohingya, Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Aktor negara ataupun aktor non-negara secara harfiah memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi internasional sebagai contohnya, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. lembaga ini memiliki pengambilan kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya *societal* (Pewita dan Yani, 2011:12).

Terdapat 250 *Non Govermental Organization* (NGO) yang secara konsisten aktif dalam mengadopsi beberapa bagian hukum internasional dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis global. Terdapat banyak NGO yang berbeda dalam agendanya di barat maupun di utara. Mereka lebih menekankan dan mengembangkan haknya dalam hak sosial-ekonomi tanpa mengabaikan hak sipil dan politik sepenuhnya, diantaranya adalah Amnesti Internasional (Forsythe, 2006 : 188-189).

. Amnesti Internasional adalah salah satu organisasi internasional non pemerintah di dunia yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di dunia. (https://www. amnesty. org/en/ who-we-are/ diakses tanggal 25 Maret 2016).

Dalam kasus yang terjadi di Myanmar, Amnesti Internasional secara intensif melakukan penelitian dan kampanye atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Hasil dari penelitian dan kampanye ini kemudian diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait kuat secara politik dalam menetapkan sebuah kebijakan politis untuk masyarakat yang bersangkutan. https:// www. amnesty.org./en/pressreleases/2010/02/myanmarendrpression ethnic- minorities-elections-20100216/diakes tanggal 12 Maret 2016).

Pada bulan Oktober tahun 2000 Amnesti Internasional melakukan kampanye yang bernama *12-Point Program for the prevention of torture by the agents of state.* Kampanye ini ditunjukan kepada pemerintah Myanmar. Amnesti Internasional ini meyakini bahwa implementasi dari program kampanye ini membawa indikasi positif bagi komitmen pemerintah Myanmar untuk mengakhiri berbagai tindakan kekerasan (*Amnesty International. Myanmar Torture Of Etnic Minority Women.2001:8-9*) .

Penyelidik HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan kepada warga Rohingya. Selain itu, PBB turut mengingatkan agar Myanmar tidak menggunakan konflik tersebut sebagai alasan untuk menyingkirkan warga minoritas tersebut. Laporan PBB menyebutkan bahwa sebanyak 28.000 etnis Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat konflik yang terjadi.Mereka bergabung di tempat-tempat pengungsian dengan 75.000 muslim Rohingya lainnya yang telah mengungsi pada saat terjadinya bentrokan pada tanggal 28 Juni 2012. saksi mata dari warga Rohingya mengatakan bahwa rumah tinggal mereka dibakar oleh warga pribumi Arakan, saat bentrokan berlangsung (http:// news. okezone. com/ read/2012/11/01/441712032pbb-myanmar-jangan-mengusir warga rohin gya/diakses tanggal 18 Maret 2016).

Pada tanggal 26 Oktober 2012, Pemerintah Myanmar mengeluarkan sebuah pernyataan terhadap sekitar 800 ribu muslim Rohingya bahwa etnis Rohingya adalah sebagai imigran ilegal dari

negara tetangga Bangladesh, dan menyebut mereka "orang-orang Bengali". Sejumlah kelompok Buddhis beberapa kali melakukan aksi protes menentang keberadaan kelompok muslim tersebut di Myanmar. Dan etnis Rohingya selama ini dianggap PBB sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia (http:// www. dw.com /id/puluhan-tewas-pasca kerusuhan terbaru rakhine-rohingya/ diakses tanggal 26 Februari 2016).

Pada tanggal 20 Mei 2015 Amnesti Internasional melakukan sebuah investigasi, Amnesti Internasional berpendapat bahwa situasi Rohingya terus memburuk di sepanjang tahun. Individu terus mengalami sebuah tindak diskriminasi dan diperburuk juga dengan pengungsi Rohingya yang semakin besar. Banyak pria, wanita dan anak-anak termasuk kelompok minoritas Muslim Rohingya dipukuli atau dibunuh setelah melarikan diri dari Myanmar. Amnesti juga mewawancarai lebih dari 100 etnis Rohingya, termasuk anak-anak yang berada di antara 1.500 orang di atas lima kapal yang mendarat di Aceh di Indonesia. Dan menurut Amnesti Internasional pengungsian besar besaran ini diakibatkan sebuah konflik yang terjadi pada tahun 2012 antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang menyebabkan 125.000 muslim Rohingya mengungsi ke berbagai negara (http://www. newsweek.com/rohingya-beaten-and killed- sea-afterescaping- myanmar-report –385252/diiakses tanggal 18 April 2016).

Selain itu juga Amnesti Internasional mengumpulkan informasi serta data data pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Ketika situasi minoritas Rohingya terus memburuk serta dirampas hak-hak kewarganegaraan di bawah UU 1982 kewarganegaraan. Mereka terus menghadapi pembatasan Hak dalam kebebasan bergerak, terbatasnya akses perawatan kesehatan dan penolakan Hak mereka untuk pendidikan dan mendapatkan kesempatan perkerjaan yang sama. Selain itu, banyak laporan berkelanjutan tentang sebuah penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya etnis Rohingya di dalam tahanan, bahkan kematian tahanan di tangan aparat keamanan (http://www. amnesty.org/en/countries/asia-and the pasific myanmar/ report/diakses tanggal 12 Maret 2016).

1.2.Rumusan Masalah\

1.2.1Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti ingin mengutarakan Bagaimana Amnesti Internasional menjalankan perannya dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya upaya apa saja yang dilakukan oleh Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015?
2. Kendala apa saja yang di hadapi Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015?
3. Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pasca Amnesti Internasional melakukan upaya upayanya pada tahun 2000-2015?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk dapat menjawab rumusan masalah "bagaimana Amnesti Internasional menjalankan perannya dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015 serta mengetahui upaya upaya apa saja serta kendala kendala apa saja dan Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di

Myanmar pasca Amnesti Internasional melakukan upaya upayanya pada tahun 2000-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan kepada Amnesti Internasional untuk dapat memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perlakuan diskriminasi entis Rohingya di Myanmar dalam menjelaskan berbagai fenomena terkait peran organisasi internasional non pemerintah dalam memperjuangkan HAM.

Secara Praktis, hasil penelitian ini Di harapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan di bidang ilmu hubungan internasional.

2 Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional sebuah studi tentang hubungan antara para pelaku dalam upaya memenuhi kepentingan yang diembannya sehingga tercipta interdepedensi dimana hubungan ini terjadi saling melintasi batas wilayah negara atau istilah *transnational*. Aleksius Jemadu menyatakan bahwa :

> " Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46)"

Hubungan Internasional yang pada awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, hal inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51)

Selain itu Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005:34).

2.2 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka memcapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005:91) .

Organisasi internasional sifatnya fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait

Pada dasarnya organisasi terdiri dari organisasi pemerintah dan juga ada Organisasi non-pemerintah yang disebut INGO(*international*

non governmental organization) dan dapat juga hanya bersifat intra-nasional yang disebut NGO (*non governmental organization*). Perbedaannya hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkupnya.

Menurut Ririen (2009), NGO biasanya memperoleh sebagian pendanaannya dari sumber-sumber swasta. Semakin baik kinerja dan produktifitas yang dihasilkan oleh sebuah NGO sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat semakin besar, maka dana yang akan mengalir ke NGO tersebut tentunya akan semakin besar pula. Hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan dari pihak-pihak donatur untuk mendanai sebuah NGO tentu saja semakin besar.

2.3 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnely.2003:7).

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Pernyataan ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dijadikan dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian dan kovenan internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, karena dia manusia maka dia memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia

Keberadaan etnis minoritas termasuk Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mengakibatkan etnis Rohingya sering menjadi korban dan mengalami kekerasan oleh pemerintahan Myanmar ataupun etnis Mayoritas sampai keberadaannya yang blokade dari dunia luar termasuk tidak diberikannya bantuan kemanusiaan. Dan hal inilah yang dinilai bahwa pemerintah Myanmar telah Melanggar Hak Asasi Manusia.

3 Objek dan Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti diantaranya adalah Amnesti Internasional dan negara Myanmar, Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini peneliti lebih menyoroti masalah terkait peranan dalam organisasi internasional non pemerintah (NGO) yaitu Amnesti internasional dan merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data. serta informasi yang dikeluarkan oleh situs-situs resmi Amnesti Internasional, kemudian diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4.Hasil dan Pembahasan

Melihat Sebuah Fenomena tersebut, terlihat jelas bahwa ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang membuat etnis Rohingya memilih untuk mengungsi ke beberapa negara tetangga. Amnesti Internasional di tahun 2000 sudah melakukan sebuah aksi kampanye dengan mendesak agar pemerintah Myanmar agar dapat menerapkan *12-Point Program for the prevention of torture by the agents of state* untuk menghentikan aksi kekerasan dan diskriminasi

terhadap etnis Rohingya pada dasarnya hal ini adalah sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, karena banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

Akibat aksi kekerasan itu juga banyak etnis Rohingya yang memilih mengungsi kebeberapa negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia mereka menumpang kapal-kapal yang diduga dikendalikan oleh jaringan penyelundup manusia dengan tujuan utama Malaysia. Selian itu Pulau Langkawi, Malaysia didarati oleh 1.107 orang pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh, yang kemudian ditempatkan di Pusat Detensi Imigrasi Belantik di negara Bagian Kedah. Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh dan ribuan orang lainnya diperkirakan masih berada di laut. Mereka pun menumpang kapal-kapal yang diduga dikendalikan oleh jaringan penyelundup manusia dengan tujuan utama Malaysia.

Atas kondisi yang memperhatinkan tersebut di sini mulailah upaya upaya yang dilakukan oleh Amnesti Internasional. Sesuai dengan tugas utamanya adalah untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia di dunia. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan Amnesti Internasional dalam Memperjuangkan HAM etnis Rohingya di Myanmar

4.1 Upaya Upaya Amnesti Internasional dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015

4.1.1 Melakukan Sebuah Kampanye Tulisan dan Aksi Protes Terhadap Pemerintah Myanmar

Amnesti internasional melakukan aksi kampanye pada dasarnya adalah aksi ini dilakukan oleh Amnesti Internasional untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya karena pemerintah Myanmar kembali melakukan aksi seperti pembunuhan dan pemerkosaan warga sipil Rohingya, serta mereka melakukan perusakan mesjid dan penganiayaan agama lainnya. yang mengakibatkan sekitar 200.000 etnis Rohingya memilih untuk mengungsi ke Bangladesh. Etnis Rohingya juga melakukan sebuah aksi protes atas kerja paksa, eksekusi, penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar

Pada tahun 2015 Amnesti Internasional melakukan aksi protes kembali dengan melakukan kampanye karena banyak para aktivis yang damai di penjarakan, pembatasan berbicara dan pencabutan hak politik kelompok minoritas, khususnya Rohingya. Menurut Amnesti Internasional sendiri setidaknya ada 19 tahanan baru nurani telah dipenjarakan sehingga total keseluruhan sudah ada 110.(https://www. amnesty.org/en/press-releases/ 2015/11/ myanmar electionmarredby-growing-repression-Andro hingyaadisenfranchisment/diakses tanggal 25 Mei 2016).

4.1.2 .Melakukan investigasi dan Mencari Bukti Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Negara Myanmar

Amnesti Internasional juga melakukan sebuah investigasi dan penyelidikan untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar karena situasi Rohingya terus memburuk, banyak individu yang menderita akibat diskriminasi di dalam hukum serta kebijakannya , dan di perburuk juga oleh krisis kemanusiaan.

Selain itu Amnesti Internasional juga melakukan sebuah wawancara dengan mewawancarai para korban, wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar ditemukannya pelanggaran pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis

Rohingya. Banyak sekali para korban etnis Rohingya yang mengalami sebuah kekerasan dan mereka memilih untuk mengungsi ke beberapa negara tetangga.

Beberapa etnis Rohingya juga menghabiskan waktu di beberapa perahu yang berbeda memberikan kesaksian pada Amnesti Internasional jika mereka melihat awak perahu membunuh penumpang Seorang pemuda Rohingya berusia 17 tahun dari Nayapara di Bangladesh berkata dia menyaksikan seorang lelaki ditembak dan dibuang ke laut karena keluarganya tidak bisa membayar tebusan dalam kurun waktu sebuah bulan yang ditentukan oleh awak perahu (Perjalanan Mematikan Krisis Pengungsi dan Perdagangan di Asia Tenggara 2015 :20).

Atas kondisi yang memprihatinkan tersebut Amnesti Internasional mempersiapkan sebuah laporan *Universal Periodic Review* (UPR) pada bulan November 2015 di negara Myanmar. UPR adalah sebuah proses laporan di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, untuk mendorong dan memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia di negaranya. UPR adalah salah satu elemen kunci dari Dewan Hak Asasi Manusia yang mengingatkan negara tentang tanggung jawab mereka untuk sepenuhnya menghormati dan melaksanakan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar. Tujuan nya adalah untuk memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia di semua negara dan menghentikan masalah pelanggaran HAM

4.13 Amnesti Internasional Bermitra dengan Organisasi lainnya untuk Membantu etnis Rohingya

Ketika itu Amnesti Internasional Australia telah bergabung dengan 93 organisasi non pemerintah yang lainnya untuk bermitra dan berkerjasama untuk para pengungsi dan imigran dari *Asia-pasific,* pada dasarnya hal ini dilakukan oleh Amnesti Internasional karena dianggap bahwa posisinya yang tidak terlalu kuat jika tidak bermitra dengan organisasi yang lainnya dan mereka mengutuk sebuah pelnggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

Selain itu karena situasi yang semakin memburuk, pada tahun 2015, Amnesti Internasional melakukan sebuah kerjasama atau bermitra dengan organisasi internasional dan LSM seperti OHCHR, HRC (*Human Rights Campaign*) dan organisasi lainnya Amnesti International mengirimkan surat rekomendasi mendokumentasikan penangkapan serta penahanan individu dan melakukan sebuah aksi untuk memperjuangkan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan hak untuk damai. Amnesti Internasional dan OHCHR juga bermaksud mendirikan kantor OHCHR pembentukan Kantor OHCHR tersebut bertujuan untuk dapat beroperasi di seluruh Myanmar dengan menjamin perlindungan terhadap etnis minoritas (http://www. burma partnership.org/ 2015/02/amnestyinternationals writtenn state ment-on-myanmar-to-the-unhuman-rights- coun cil-ahead-of-the-28th-session-of-the-council-from -2-27march-2015-human-rights-under-threat /diakses tanggal 6 Juni 2016).

4.1.4 Menuntut kebijakan pemerintah dan mengirimkan surat Rekomendasi terhadap pemerintah Myanmar

Amnesti internasional juga menuntut sebuah kebijakan pemerintah Myanmar yang dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena menurut peneliti sendiri, ketika Amnesti Internasional melakukan aksinya dengan mengirimkan surat rekomendasi ini diharapkan dapat menghentikan aksi diskriminasi dan

kekerasan terhadap etnis minoritas. Karena rekomendasi ini ditujukan terhadap pemerintah secara langsung agar pemerintah Myanmar dapat menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan (https://www. amnesty. org/ en/documents/asa16/2276/2015/en/diakses tanggal 28 Mei 2016).

4.1.5. Mengirimkan Surat Rekomendasi Kepada Beberapa Negara Tetangga dan Komunitas Internasional Untuk Melindungi Etnis Rohingya

Pada dasarnya adalah Amnesti Internasional ini mengirimkan ke beberapa negara tentangga untuk melindungi etnis Rohingya, karena banyak sekali etnis Rohingya memilih untuk tinggal ke negara tetangga karena di Myanmar mereka tidak diperlakukan selayaknya seperti manusia. Oleh karena itulah Amnesti Internasional mengirimkan beberapa rekomendasi ke negara tetangga untuk bertindak atas kewajiban mereka di bawah Hak Asasi Manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional, termasuk memberikan akses Rohingya untuk dapat masuk ke negara mereka (http://e-archive .bnionline. net/index. php/news/ kaladan/10134-rohingya-at-risk-need-protection-amnesty-international.html/ diakses tanggal 6 Juni 2016).

Atas dikirimkannya surat rekomendasi tersebut menimbulkan beberapa respon diantarnya adalah Indonesia dan Malaysia juga telah memberikan sebuah kebijakan untuk para pencari suaka untuk tinggal sampai Mei 2016, Amnesti Internasional terus menyerukan pada pemerintah untuk berbuat lebih banyak, dan untuk badan-badan internasional untuk mengambil "tindakan terkoordinasi terhadap perdagangan manusia dengan cara yang tidak menempatkan kehidupan masyarakat atau Hak Asasi Manusia

4.2.Kendala Amnesti Internasional dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya di Myanmar Pada Tahun 2000-2015

Dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia tentu saja banyak kendala yang di hadapi oleh Amnesti Internasional, Dalam sebuah kampanye untuk menuntut negara Myanmar untuk menerapkan 12-*point program* Amnesti mendapatkan berbagai kendala, karena aksi kampanye dan tuntutan tersebut tidak terlalu di respon oleh pemerintah Myanmar, pada akhirnya Amnesti Internasional terus melakukan investigasi dan mencari fakta-fakta serta bukti bukti yang sekiranya dapat ditemukan untuk mencari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung, investigasi, serta wawancara langsung dengan para korban yang mendapatkan tindakan kekerasan. namun dengan seiring berjalannya waktu pemerintah akhirnya merespon tentang laporan dari Amnesti Internasional tentang catatan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar. Dan bahkan mereka memberikan pernyataan bahwa kami tidak melakukan hal tersebut dan mereka terus menutupinya padahal Amnesti sudah melakukan riset lapangan. Selain itu kendala lain adalah kurangnya peran dunia internasional untuk membantu menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi

Amnesti Internasional juga tergolong sebagai organisasi non pemerintah, walaupun bebas dalam berbagai tindakannya namun ruang lingkupnya masih sangatlah terbatas karena terkendala dengan kedaulatan sebuah negara selain itu juga Dikarenakan adanya pembatasan dari pemerintah, selain itu, masyarakat Buddhis Rakhine tidak memberikan kepercayaan terhadap organisasi non pemerintah karena organisasi non

pemerintah in dianggap mencari keuntungan pribadi, hal itulah yang menyebabkan Amnesti Internasional dan organisasi non pemerintah lainnya pun sulit untuk akses bantuan terhadap etnis Rohingya (https ://www. amnesty. org/en/ latest/news/2015/05/why-are-the-rohingya-flee ing-myanmar/ diakses tanggal 9 Juni).

4.2.3.Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pasca Amnesti Internasional Melakukan Upaya Upayanya Pada Tahun 2000-2015

Banyak faktor lain yang membuat dunia internasional sulit dalam menangani kasus Rohingya. Kedaulatan suatu negara sangatlah di junjung tinggi oleh dunia internasional, sehingga peran dari dunia internasional masih sangatlah terbatas dan tidak dapat melakukan intervensi terhadap pemerintah Myanmar karena mereka memiliki kedaulatan sendiri, ditambah juga pemerintah Myanmar sangatlah tertutup mengenai permasalahan ini,.

Amnesti Internasional terus melakukan upaya upayanya untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya di Myanmar dan tentu saja memberikan perkembangan yang cukup signifikan. Pada dasarnya ketika sidang umum PBB telah di putuskan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak jauh dari peran Amnesti Internasional di dalamnya atas laporan laporan pelanggaran yang telah dipersebaluaskan. Pemerintah Myanmar pun sempat merespon atas laporan Amnesti Internasional bahwa mereka mereka tidak melakukan pelanggaran tersebut, padahal Amnesti internasional dengan jelas melakukan riset lapangan dan menemukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan.

Selain itu Amnesti Internasional membuat laporan *Universal Periodic Reiview* (UPR) yang yang diterbitkan pada tahun 2010 dan lalu diserahkan kepada PBB, Atas hal yang memperihatinkan tersebut pada tanggal 9 Juni 2015 ICJ melakukan pertemuan diplomatik, menanggapi tentang laporan *Universal Periodic Review* (UPR), dengan duta besar dan perwakilan diplomatik tingkat tinggi, Acara ini juga bertujuan untuk menindak lanjuti kepada pemerintah Myanmar untuk secara efektif menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia. Amnesti International dan organisasi Hak Asasi Manusia yang lainnya juga ikut dalam pertemuan tersebut, yang pada dasarnya hal ini dilakukan untuk menghentikan berbagai perlanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar.

Pertemuan diplomatik tersbut juga bertujuanuntuk memberikan kesempatan organisasi di bidang Hak Asasi Manusia internasional untuk untuk menegaskan kembali laporan *Universal Peridic Review (UPR).* Duta Besar Denmark Peter Lysholt-Hansen menjadi tuan rumah acara di Nordic House. Anggota komunitas diplomatik yang hadir di dalam petemuan tersebut diantaranya adalah dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Denmark, Norwegia, Swedia, Jerman, Prancis, Vietnam, Malaysia dan Australia. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan kembali oleh berbagai negara, organisasi non-pemerintah lokal mamupun organisasi internasional lainnya (http://www.icj.org/myanmar-icj-organizes-universal-periodic-review-diplomatic-dialogue/ diakses tanggal 24 Juli 2016).

Pada tanggal 2-13 November 2015 dilakukan sebuah pertemuan kembali membahas *Universal Periodic Review* di Myanmar. Pada dasarnya Amnesti Internasional juga ikut mengambil alih dalam mencatat *Universal Periodic Reiview* di Myanmar dan melakukan investigasi untuk mencatat dan melihat berbagai situasi pelanggaran HAM yang dilakukan.. Pada dasarnya Myanmar adalah salah satu negara yang memilki tingkat pelanggaran HAM yang sangat tinggi terhadap etnis minoritas (http:// www. refworld.

org/docid/56c2e2e54.html/ diakses tanggal 10 Juni 2016).

Dalam membahas pertemuan tersebut ternyata banyak menuai berbagai respon dari beberapa negara atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan di negara Myanmar.. Negara negara tersebut memberikan rekomendasi kepada pemerintah Myanmar agar mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar, terutama bagi etnis minoritas temasuk etnis Rohingya yang sangat rentan terhadap kekerasan, selain itu juga mereka ingin mereka menekankan pentingnya mencegah dan menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berdasarkan ras, etnis dan agama. Oleh karena itulah peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa Amnesti Internasional memberikan sebuah pengaruhnya, Karena menurut peneliti sendiri, respon dari berbagai negara ini adalah salah satu bentuk pemerintah Myanmar sedang ada di posisi tertekan. Karena Myanmar perlu dalam hubungan serta kerjasama dengan negara lain dan jika banyak berbagai kecaman dari berbagai negara otomatis citra negara Myanmar di dunia internasional akan sangatlah buruk, oleh karena itulah menurut peneliti sendiri Amnesti Internasional telah berhasil menekan pemeintah Myanmar serta memberikan pengaruhnya terhadap etnis Rohingya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Pada dasarnya isu Rohingya ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan, dimana terdapat sebuah kekerasan, dan perlakuan diskirminasi terhadap etnis Rohingya. Penduduk Muslim Rohingya pun masih dianggap sebagai kelompok etnis yang tidak berkewarganegaraan. Selain tidak diberikan kewarganegaraannya etnis ini juga untuk memilih mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia dan yang lainnya yang menimbulkan permasalahan baru bagi negara tetangga. Amnesti Internasional melakkan berbagai upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di negara Mynamar, dari tahun 2000-2015 seperti melakukan kampanye,investigasi, mengirim surat rekomendasi bermitra dengan organisasi lainnya untuk membantu etnis Rohngya, dan yang lainnya dengan harapan agar pemerintah Myanmar dapat menghentikan pelanggaran HAM yang telah dilakukan.
2. Banyak sekali kendala yang dialami oleh Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya di negara Myanmar diantaranya adalah Amnesti Internasional juga masih tergolong sebagai organisasi non pemerintah yang membuat ruang lingkupnya masih sangatlah terbatas, Buddhis Rakhine tidak memiliki sebuah kepercayaan terhadap organisasi non pemerintah karena dianggap organisasi internasional ini hanya mencari keuntungan saja itulah yang menyebabkan Amnesti Internasional dan organisasi non pemerintah lainnya pun sulit untuk melakukan akses bantuan terhadap etnis Rohingya.
3. Amnesti Internasional telah membeikan pengaruhnya dan memberikan perkembangan setelah melakukan upaya upayanya pada tahun 2000-2015. Pada dasarnya ketika sidang umum PBB yang telah menetapkan bahwa isu Rohingya ini adalah sebuah isu tragedi kemanusiaan. Hal tersebut tidak jauh dari peran Amnesti Internasional di dalamnya. Pada tanggal 2-13 November 2015 dilakukan sebuah pertemuan oleh 93 delegasi dari berbagai negara untuk membahas *Universal Periodic Review (UPR)* Pada dasarnya Myanmar adalah salah satu negara yang memilki tingkat pelanggaran HAM yang sangat tinggi terhadap etnis minoritas. dan

Amnesti Internasional juga ikut mengambil alih dalam mencatat *Universal Periodic Reiview* banyak sekali respon dari berbagai negara menanggapi UPR tersebut mereka memberikan sebuah rekomendasi terhadap pemerintah Myanmar agar dapat menghentikan perlakuannya yang dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. dan hal inilah yang dianggap bahwa perjuangan dan upaya yang dilakukan Amnesti Internasional ini telah membawa hasil.

5.2 Saran

1. Untuk pemerintah Myanmar, seharusnya dapat melindungi Hak Asasi Manusia untuk semua etnis minoritas, terutama etnis Rohingya, dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM, Pemerintah Myanmar juga harus menjamin akses Rohingya dan etnis minoritas lainnya dalam hak penuh hak-hak sipil dan politik khususnya hak untuk memilih dalam pemilu yang akan datang. Karena sudah sepatutnya pemerintah Myanmar merevisi UU 1982 dan memberikan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.
2. Untuk Amnesti Internasional harus terus memperjuangkan dan memberikan upaya upayanya agar pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia ini dapat di hentikan, Selain itu juga sebaiknya Amnesti Internasional melakukan kampanye secara rutin dan menjalin hubungan yang baik dengan warga setempat untuk menghentikan pelanggaran HAM. Pada dasarnya banyak orang di dunia yang membutuhkan keadilan dan dukungan agar Hak nya dapat di tegakan dengan sebagaimana mestinya. Amnesti Internasional juga sebaiknya terus bermitra dan memperluas jaringan dalam kerjasama dengan organisasi lainnya dalam memberikan bantuan serta memperjuangkan Hak Asasi Manusia, tidak hanya di Myanmar tetapi juga di dunia.

Daftar Pustaka

Acuan dari Buku

Donnely, Jack.2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice,* Ithaca and London.Cornell : University Press

Forsythe, David P 2006. *Human Rights in International Relations. New York* United States of America : Cambridge University Press

Jackson, Robert, dan Sorensen, George, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jemadu, Aleksisus. 2008. *politik global dalam teori dan politik,* Yogyakarta : Graha Ilmu

Perwita, A.A Banyu, & Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rudy, T May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah – Masalah Global.* Bandung : Refika Aditama.

.Winarno,Budi. 2004. *Isu Isu Global Kontemporer* .Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Acuan dari Dokumen

Amnesty International. 2001. Myanmar Torture Of Ethnic Minority Women .melalui http:// www.refworld.org/pdfid/3b83b6f815.pdf./[21/05/2016].

Amnesty International. 2015. perjalanan mematikan kerisis pengungsi dan perdagangan di Asia Tenggara

Human Rights Council. 2015. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Myanmar.melalui http:// www. refworld.org/ docid/ 56c2e2e54 .html /[10/06/2016]..

Acuan dari Website

Amnesty International.2012 https:// www. amnesty. org/enwho-we-are [25/03/20 16].

Amnesty International 2015. https:/ /www. amnesty.org/en/press-releases /2015/ 11 / myanmar-elections-marred-by-growing-repression-and-rohingya-disenfranchisement /[25/05/2016].

Amnesty International. 2015. https: //www. amnesty. org/en/latest/ news/ 2015/ 05/why-are-the-rohingya –fleeing -myanmar/ [09/ 06/2016].

Amnesty International. 2015.https://www. amnesty .org/en/countries/asia-and-the-pacific/ myanmar/report-myanmar/[28/05/2016].

Amnesty International 2015. https:// www. amnesty .org/en/press-releases /2015/ 11 /myanmar-elections-marred-by-growing-repression-and -rohingya-disenfranchisement/ [25/ 05 / 2016].

Burma Partnership. 2015. http://www. burma partnership .org/ 2015/02/amnesty-internationals-writtennstatement-on-myanmar-to-the-un-human-rights-council-ahead-of-the-28th-session-of-the-council-from-2-27march-2015 -human-rights-under-threat /[06/06/2016].

http://e-archive .bnionline. net/ index. php/ news/ kaladan/10134-rohingya-at-risk-need-protection-amnesty-international.html/[06/06/2016].

Newssweek.2015.http://www.newsweek.com/rohingya-beaten-and killed-sea-aftere scaping mynamar- report 385252 [18/04/2016].

Puluhan Tewas Pasca Kerusuhan Terbaru Rakhine-Rohingya. 2012. http://www. dw.com/id /puluhan-tewas-pasca-kerusuhanterbaru rakhine-rohingya/ [26/02/2016].

Wahyu Dwi Anggoro. 2012. http:/ /news. okezone. com/read/2012/11/01/411/71203/pbb-myanmar-jangan- mengusir-warga-rohingya [18/03/2016]